**ABSTRAK**

Masalah yang sering terjadi di kota besar termasuk Kota Semarang yakni masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) karena Kota Semarang dikenal sebagai Kota Metropolitan yang menjadi magnet usaha bagi masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Dimana PKL merupakan usaha kecil di sektor informal.

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 mencanangkan program peraturan dan pembinaan bagi PKL di Kota Semarang. Dan salah satu area yang menjadi konsentrasi utama pertumbuhan PKL di Kota Semarang adalah di Kawasan Simpang Lima. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Laporan Akhir **“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah”.**

Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, dan mengetahui dan mendeskripsikan yang menjadi kendala kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, serta mengetahui dan mendeskripsikan upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang.

Metode magang yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi.

Berdasarkan hasil magang yang dilakukan, penulis memperoleh deskripsi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam menegakkan peraturan daerah yang berlaku yaitu kurangnya koordinasi antar dinas yang bersangkutan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah yang berlaku, masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, kurangnya pemahaman aparat Satpol PP Kota Semarang, kurangnya personil yang berkompetensi dan tidak adanya ketersediaan sinergi data di masing-masing SKPD.

Kata Kunci : Peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja

***ABSTRACT***

*Problems that often occur in big cities including Semarang City that is the problem of street vendors (PKL) because the city of Semarang know as a metropolitan city that became a magnet business for people with a weak economy. Where street vendors is a small business in the informal sector.*

*Semarang City government through local regulation number 11 year 2000 proclaimed program of regulation and development for street vendors in Semarang city. And one of the areas that became the main concentration of street vendors growth in Semarang is in the intersection area. Therefore, the authors take the title of the final report* ***“Performance of Civil Service Police Unit in Enforcing Regional Regulation Number 11 year 2000 In Inter Section Area Semarang City, Central Java Province”***

*The purpose of this report is to know and describe the performance of civil service police unit in enforcing regional regulation number 11 year 2000 in the intersection area of five Semarang City, and to know and describe which become obstade performance of civil service police unit in enforcing regional regulation number 11 year 2000 in the intersection area of five Semarang City, as well as know and describe the efforts of civil service police unit to resolve the obstacks in enforcing regional regulation number 11 year 2000 in the intersection area of five Semarang City.*

*The internship method used is quantitative research with descriptive method and inductive approach. Data collection techniques used are observation, interview and documentation and using data analysis triangulation.*

*Based on the results of internships conducted, the authors obtained description of the performance of civil service police unit of Semarang City in enforcing regional regulation number 11 year 2000 in the intersection of five cities Semarang in Central Java Province is still not optimal because there are still obstacies in enforcing the prevailing local regulations lack of coordination among relevant agencies, the lack of awareness of the community in compiying with the prevailing local regulations, the lack of understanding of the city police in Semarang, the lack of competent personel and the lack of availability of the data a synergies in each SKPD.*

*Keywords : Regulation, Civil Service Police Unit*